

Melacak Dinasti Politik Anggota Parlemen Muda dan Termuda Pada Pemilu Legislatif 2024 di Indonesia

Oleh:

Harsen Roy Tampomuri¹, Franky P. Roring², Yuni M. Tampomuri³

Ilmu Politik, Universitas Bung Karno^{1 2}; Politeknik STIA LAN Jakarta³

Email: harsentampomuri@gmail.com¹; frankypst77@gmail.com²

yunimurni.tampomuri@gmail.com³

Abstrak

Relasi keluarga atau kekerabatan dalam politik menjadi hal yang kian dibahas jika dilihat pada konteks kajian demokrasi khususnya pemilihan. Hal ini banyak dilekatkan dengan diksi dinasti politik atau kekuasaan yang dijalankan oleh sekelompok orang yang berada dalam hubungan keluarga. Dinasti politik pada pemilu 2024 merata pada semua kalangan usia termasuk kaum muda yang ada pada kisaran usia di bawah 40 tahun. Data Litbang Kompas (2024) mencatat angka 62,6 persen (82) dari 131 figur muda di parlemen berasal dari dinasti politik. Penelitian ini melakukan elaborasi dengan melihat kehadiran figur muda di parlemen Indonesia baik DPR RI maupun DPD RI periode 2024-2029. Temuan secara umum penelitian ini mengonfirmasi bahwa figur muda di parlemen juga didominasi dari latar dinasti politik. Sedangkan Anggota Parlemen termuda baik DPR maupun DPD dua-duanya diisi oleh politisi muda dengan afiliasi dinasti politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder.

Kata kunci: Anggota Parlemen Termuda, Dinasti Politik, Pemilu Legislatif

Abstract

Family or kinship relations in politics are increasingly being discussed when viewed in the context of democracy studies, especially elections. This is often associated with the term of political dynasty or power exercised by a group of people who are part of a family relationship. Political dynasties in the 2024 election are evenly distributed across all age groups, including young people who are in the age range under 40 years. Data from Kompas Research and Development (2024) recorded that 62.6 percent (82) of the 131 young figures in parliament came from the political dynasties. This study elaborates by looking at the presence of young figures in the Indonesian parliament, both the DPR RI and DPD RI for the 2024-2029 period. The general findings of this study confirm that young figures in parliament are also dominated by political dynasty backgrounds. Meanwhile, the youngest members of parliament, both the DPR and DPD, are both filled by young politicians with political dynasty affiliations. This study uses qualitative research methods with secondary data sources.

Keywords: *Youngest Members of Parliament, Political Dynasty, Legislative Elections*

I. Pendahuluan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilu Legislatif 2024 pada tanggal 20 Maret 2024 di Jakarta. Selanjutnya pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI masa jabatan tahun 2024-2029 dilangsungkan dalam sidang paripurna yang digelar di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, di Jakarta tanggal 1 Oktober 2024. Diantara

para Anggota DPR dan DPD RI hadirlah representasi tokoh muda dengan berbagai latar belakang baik yang terafiliasi politik keluarga atau dinasti politik, keluarga pengusaha maupun tokoh muda inspiratif dengan berbagai aktivitas sosial yang dilakukan di tengah masyarakat.

Hal menarik dari kehadiran para tokoh muda di parlemen yakni bagaimana mereka memasuki panggung politik. Apakah kehadiran para tokoh muda benar-benar melalui tahapan kaderisasi partai politik, politik keluarga, lingkaran pengusaha dalam kekuasaan, aktivitas sosial atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Apapun itu, kehadiran para tokoh muda diharapkan hadir sebagai representasi kaum muda yang harus menyuarakan kepentingan publik termasuk generasi muda melalui tugas-tugas legislasi, anggaran dan pengawasan.

Namun menurut data dari *platform* Parlemen Kita dipublikasikan bahwa pada rentang pelaksanaan pemilu 2009-2024 ada penurunan jumlah anggota parlemen yang berusia 40 tahun ke bawah. Pada pemilu 2009 terdapat 106 dari 560 orang anggota parlemen, pada tahun 2014 turun signifikan yakni 39 dari 561 orang anggota parlemen, tahun 2019 terdapat 81 orang dari 574 orang anggota parlemen dan kembali turun pada tahun 2024 dengan 76 orang dari 580 orang anggota parlemen (parlemenkita.org, 2024).

DPR RI sendiri untuk usia Anggota DPR termuda periode 2024-2029 yakni Annisa Maharani Alzahra Mahesa, S.E., B.Com yang terpilih pada usia 22 tahun (lahir 17 Juli 2001). Kader Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten II yang berhasil meraih total 122.470 suara. Annisa merupakan putri dari seorang aktivis dan politikus Indonesia, almarhum Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. yang menjabat sebagai Anggota DPR RI sejak tahun 2009 hingga wafatnya pada tahun 2023 mewakili daerah pemilihan Kalimantan Timur (2009–2014) dan Banten II (2014–2023).

Untuk Anggota DPD RI usianya lebih muda lagi yakni Larasati Moriska, S.E yang terpilih pada usia 22 tahun (lahir 1 Januari 2002). Larasati adalah anak dari Nardi Azis, politikus Partai Bulan Bintang (PBB) yang menjabat sebagai Ketua DPRD Nunukan periode 2009–2014 dan Asni Hafid sebagai politikus yang menjabat Anggota DPD 2019–2024 sekaligus adik dari Tamara Moriska (Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara periode 2019–2024 dan 2024–2029). Larasati juga merupakan cucu dari Abdul Hafid Achmad seorang politisi yang menjabat sebagai Bupati Nunukan pertama yang saat ini menjadi Ketua DPW Partai NasDem Kalimantan Utara dan Rahma Leppa, Ketua DPRD Nunukan periode 2019–2024 sekaligus Ketua DPD Partai Hanura Nunukan. Larasati juga keponakan dari Asmin Laura Hafid, Bupati Nunukan dua periode, 2016–2021 dan 2021–2025.

Kehadiran para anggota parlemen muda tidak lepas dari mekanisme di tubuh partai politik sebagai *political representation* dan mekanisme pada jalur independen sebagai *regional representation*. Menariknya untuk kedua mekanisme tersebut terdapat anggota parlemen termuda yang kedua-duanya baik DPR maupun DPD diisi oleh figur muda yang tidak lepas dari lingkaran politik keluarga atau yang diasosiasikan juga sebagai politik dinasti. Salsabila Rahadatul 'Aisy (2023) melakukan penelitian dengan melacak dinasti politik di Indonesia dan

melihat studi kasus kekuasaan keluarga pada ragam periode sejarah. Dinasti politik di Indonesia telah berkembang sejak masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Politik keluarga tidak hanya terjadi ditingkat nasional maupun regional dan dalam konteks Indonesia sendiri politik keluarga dipandang sebagai penyakit demokrasi karena dinilai sebagai langkah distorsi esensi demokrasi.

Hal ini dikarenakan politisi dari dinasti politik lebih mengutamakan sumber daya finansial yang lebih kuat, popularitas keluarga yang lebih besar, serta kemampuan untuk memobilisasi pendukung dalam jumlah besar. Mereka lebih berpeluang untuk menang dibandingkan kandidat yang tidak memiliki ikatan dengan elit yang memegang jabatan. Hal ini bagi Salsabila dinilai membatasi kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pencalonan (Aisy, 2023). Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dan sumber data sekunder. Selanjutnya terkait dengan politik dinasti dan seleksi kandidat legislatif, Prakoso dan Kosandi (2024) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa politik dinasti merupakan fenomena dalam sistem demokrasi yang mana kekuasaan politik diwariskan dalam keluarga.

Bagi Prakoso dan Kosandi, fenomena ini dapat ditemukan diberbagai negara seperti Amerika Serikat, Filipina, Bangladesh dan Indonesia. Politik dinasti sebagai kekuasaan yang memberikan keuntungan bagi keluarga tertentu untuk memperoleh suara dalam pemilu. Kualitas kepemimpinan, kelemahan parpol dan regulasi serta oligarki yang berkuasa dilihat sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya dinasti politik. Dalam konteks Indonesia, politik dinasti secara pesat berkembang baik ditingkat lokal maupun nasional dan didukung oleh desentralisasi juga reformasi politik. Parpol berperan dominan dalam memberi dukungan pada politik dinasti melalui proses rekrutmen dan kandidasi.

Namun walaupun dinasti politik lebih dianggap merusak demokrasi dan mendorong korupsi, penelitian Prakoso dan Kosandi menunjukkan bahwa ada kepuasan bagi kinerja dinasti politik di daerah tertentu. Penelitian ini memiliki tujuan dalam upaya menganalisis proses seleksi calon anggota legislatif dari keluarga dinasti di parpol yang berfokus pada Pemilu 2024 dan pola seleksi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Data yang digunakan yakni dari hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini hasilnya menunjukkan bahwa calon anggota legislatif yang berasal dari parpol yang memiliki afiliasi dengan keluarga pengurus partai serta pejabat publik sebagai fenomena yang tidak terpisahkan dari pemilu ke pemilu (Amriyono Prakoso, Meidi Kosandi, 2024).

Kedua penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti karena tidak secara khusus membahas bagaimana para anggota parlemen muda dan termuda pada periode 2024-2029 dalam lingkaran politik keluarga/dinasti politik. Demikian juga dengan anggota parlemen dari DPR RI yang coba diulas bersama dengan anggota DPD RI muda dan termuda. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dan menggunakan sumber data sekunder dari berbagai jurnal, buku, laporan penelitian dan sumber-sumber dari berbagai media masa. Diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam khazanah kajian ilmu politik yang terkait dengan demokrasi dan kepemiluan.

II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Anggota Parlemen Muda dan Afiliasi Dinasti Politik

Pergantian masa jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 1 Oktober 2024 diikuti dengan datangnya generasi muda di jajaran anggota parlemen baik DPR RI maupun DPD RI. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (RI) telah resmi memasuki masa bakti periode 2024-2029. Sebanyak 152 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Para tokoh muda diharapkan dapat membawa semangat baru dan idealisme serta inovasi baru menuju parlemen modern yang didalamnya kepercayaan publik serta legitimasinya semakin meningkat. Namun pada waktu bersamaan, anggota parlemen dari kalangan muda ternyata didominasi oleh mereka yang berasal dari keluarga pejabat publik atau tokoh politik berpengaruh di daerah maupun nasional.

Hasil laporan penelitian dari *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)* pada tanggal 24 April 2024 berjudul "Membangun Parlemen yang Setara untuk Anak Muda dan Perempuan" menunjukkan data penting bagi keterwakilan Anak Muda. Laporan ini menganalisis peta keterwakilan kelompok yang belum terwakili secara politik (*under-represented*) dari tahun ke tahun, terutama anggota DPR perempuan dan anggota legislatif muda, yang berusia di bawah 40 tahun (Fernandes, 2024). Dalam laporan ini CSIS melihat cukup beratnya kompetisi politik bagi para penantang atau caleg (calon legislatif) berusia muda untuk bertarung mendapatkan kursi dalam sistem proporsional terbuka, apalagi dengan tren meningkatnya jumlah anggota DPR dari inkumben dan anggota DPR yang memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dengan dinasti politik.

Tabel 1

Perbandingan Usia Anggota Legislatif pada Tingkat Global dan Indonesia

Kriteria	Global-IPU (2023) – (dalam %)	Indonesia (2024) – (dalam %)	Rata-rata 6 Pemilu – (dalam %)
Dibawah 30	2,8	3,6	2,66
Dibawah 40	18,8	15,0	17,53
Dibawah 45	32,1	27,8	34,33

Sumber: CSIS, 2024

Beberapa temuan utama dari laporan tersebut yakni masih rendahnya representasi anggota DPR pada usia di bawah 40 tahun dibandingkan dengan populasi pemilih berusia di bawah 40 tahun secara nasional. Selanjutnya, politisi muda mengalami kesulitan untuk bisa menembus kursi parlemen di Senayan karena tingginya dinasti politik. Ada lebih dari 50 persen

anggota DPR muda yang terpilih (50/87) merupakan figur yang datang dari politik keluarga atau dinasti politik atau sebesar 57,5 persen. Secara lebih luas lagi untuk semua Anggota DPR, ada angka yang cukup tinggi untuk Anggota DPR yang memiliki hubungan dengan politik keluarga atau dinasti politik. Dari 580 Anggota DPR terdapat 138 orang Anggota DPR yang memiliki hubungan dengan dinasti kekuasaan atau 23,8 persen dari total 580 Anggota DPR (Fernandes, 2024).

Tabel 2
Komposisi Anggota DPR Terpilih Berdasarkan Hubungan dengan Dinasti Politik

Partai Politik	Total Kursi	Terasosiasi Dinasti (%)	Tidak Terasosiasi Dinasti (%)
NASDEM	69	33,3	66,7
PDIP	110	27,3	72,7
GOLKAR	102	26,5	73,5
GERINDRA	86	25,6	74,4
DEMOKRAT	44	20,5	79,5
PAN	48	18,8	81,3
PKB	68	17,6	82,4
PKS	53	11,3	88,7

Sumber: CSIS, 2024

Sedangkan untuk partai politik pengusung yang paling banyak terafiliasi dengan anggota parlemen dalam dinasti politik pada urusan lima besar adalah sebagai berikut: 1) Nasdem 33,3 %, 2) PDIP 27,3 %, 3) Golkar 26,5 %, Gerindra 25,6 %, dan Demokrat 20,5 %. Bila data terkait dinasti politik dibuat rinciannya berdasarkan hubungan darah atau kekerabatan dengan dinasti politik maka diperoleh data bahwa sebagian besar dari 138 anggota DPR terpilih adalah anak dari dinasti politik yakni sebesar 38,4 persen, disusul istri (21,7 persen), lalu adik (14,5 persen) dan kategori lainnya di bawah 10 persen.

Tabel 3
Latar Belakang Dinasti Politik per Partai Politik

Partai Politik	Total Kursi	Total Dinasti	% Per Partai	Anak	Istri	Adik	Suami	Kakak	Keponakan	Lainnya	Total
NASDEM	69	23	33.3	8	8	2	3		2		23
PDIP	110	30	27.3	13	8	3		2	1	3	30
GOLKAR	102	27	26.5	13	4	4	2	1	1	2	27
GERINDRA	86	22	25.6	7	5	3	2		2	3	22
DEMOKRAT	44	9	20.5	5	1				1	2	9
PAN	48	9	18.8	3	1	4				1	9
PKB	68	12	17.6	2	1	3	2	4			12
PKS	53	6	11.3	2	2	1	1				6
Total	580	138		53	30	20	10	7	7	11	138
Persentase (%)				38,4	21,7	14,5	7,2	5,1	5,1	8,0	100,0

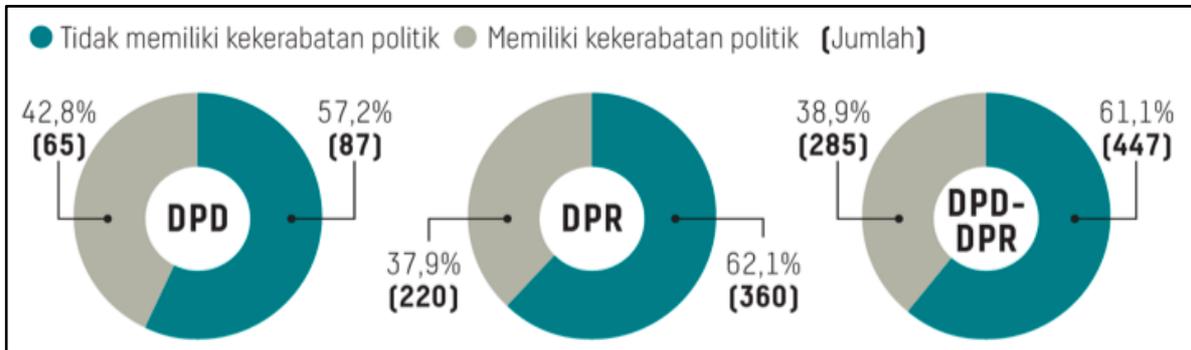
Sumber: CSIS, 2024

Hasil penelitian Litbang Kompas pada tahun 2024 yang menjelaskan bahwa proporsi anggota parlemen yang memiliki kekerabatan politik di DPD lebih besar dibandingkan dengan Anggota DPR. Persentase ikatan kekerabatan politik di DPD mencapai 42,8 persen atau hampir sebagian dari Anggota DPD. Jumlah tersebut lebih tinggi 4,8 persen dibandingkan dengan Anggota DPR RI pada angka 37,0 persen. Sebanyak 38,8 persen anggota MPR RI pada periode

2024-2029 yang memiliki relasi kekerabatan atau dinasti politik. Seorang anggota parlemen dikatakan memiliki relasi dinasti jika terdapat hubungan kekeluargaan yang bersifat horizontal atau vertikal antara anggota parlemen dan pejabat publik/legislatif lainnya (Kompas, 2024).

Gambar 1

Kekerabatan Politik Anggota Terpilih DPD dan PR RI 2024-2029



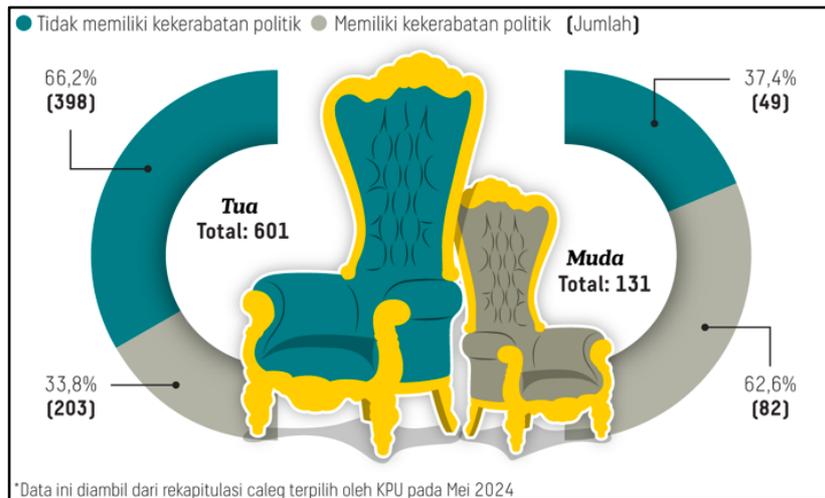
Sumber: Data KPU dan Pemberitaan Kompas
Diolah Litbang Kompas, BRM (2024)

Bentuk relasi atau ikatan kekerabatan dalam dinasti politik dibagi kedalam dua kategori yakni relasi horizontal dan relasi vertikal. Adapun yang dimaksud dengan relasi horizontal adalah relasi kekita anggota Dewan memiliki hubungan kekeluargaan yang sejajar dengan pejabat publik atau tokoh yang berpengaruh secara politik. Sebagai contoh: suami-istri, kakak-adik, sepupu, besan, dan sejenisnya. Sedangkan relasi vertikal artinya memiliki hubungan yang bertingkat atau tidak sejajar, seperti anak-orangtua, cucu-kakek/nenek, keponakan-bibi/paman, mertua-menantu, dan sejenisnya (Kompas, 2024).

Dari total 285 Anggota MPR termasuk didalamnya DPR dan DPD, yang terafiliasi kekerabatan politik yakni sebanyak 53 persen memiliki relasi vertikal. Sebagian besar memiliki ayah seorang pejabat publik atau tokoh politik berpengaruh, yakni sebanyak 92 orang. Sementara itu, anggota terindikasi dinasti politik yang memiliki hubungan horizontal mencapai 47 persen. Sepertiga atau 45 orang di antaranya memiliki suami yang merupakan tokoh berpengaruh ataupun pejabat publik.

Gambar 2

Persentase Anggota DPD dan DPR RI 2024-2029 yang Memiliki Relasi Kekerabatan Politik Berdasarkan Usia



Sumber: KPU dan Pemberitaan Kompas
Diolah oleh Litbang Kompas/BRM

Dari gambar infografis ini memberikan gambaran bahwa kehadiran anggota parlemen baik DPD maupun DPR jika dilihat dari kategorisasi usia tua dan muda yakni masing-masing ada 601 anggota parlemen usia tua dan 131 usia muda. Dari angka tersebut jika dibuat *breakdown* lagi maka didapatkan angka 66,2 persen (398) pada kategori usia tua dan 37,4 persen kategori usia muda yang tidak memiliki kekerabatan politik. Sedangkan untuk anggota parlemen yang memiliki kekerabatan politik yakni 33,8 persen (203) pada kategori usia tua dan 62,6 persen pada kategori muda. Dengan kata lain para anggota parlemen muda lebih didominasi oleh anggota DPR dan DPD yang datang dari latar belakang keterpilihan karena relasi kekerabatan dengan pejabat publik atau tokoh politik berpengaruh.

B. Anggota Parlemen Termuda dalam Pusaran Dinasti Politik

Pada bagian sebelumnya telah diulas bahwa ada jumlah yang signifikan bagi anggota parlemen berusia muda baik di DPR maupun DPD yang terafiliasi dinasti politik atau keterpilihan karena relasi kekerabatan dengan pejabat publik dan tokoh politik berpengaruh. Hal ini tentu memberikan sebuah pertanyaan publik apakah para anggota parlemen muda akan hadir sebagai jawaban kebutuhan publik lewat parlemen atau sebaliknya. Yang masih menjadi tantangan kaum muda untuk menembus kursi parlemen yakni adanya inkumben dari kelompok usia tua sebagai anggota parlemen tak tergantikan selama beberapa periode.

Gambar 3
Anggota DPR Tertua dan Termuda Periode 2024-2029

Katadata.co.id
#KalauBicaraPakaiData

Profil Anggota DPR Tertua dan Termuda

Guntur Sasono	Annisa Maharani A. M.
Anggota DPR RI Tertua 2024-2029	Anggota DPR RI Termuda 2024-2029
Demokrat	Gerindra
2 Juli 1946 (78 tahun)	17 Juli 2001 (23 tahun)
<ul style="list-style-type: none">• S1 Administrasi Negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya• S2 Publik Administrasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	<ul style="list-style-type: none">• S1 Manajemen Universitas Indonesia <i>University of Melbourne (double degree program)</i>
<ul style="list-style-type: none">• Anggota DPR RI (2004-2009, 2009-2014, 2014-2019, 2019-2024, 2024-2029)• Anggota DPRD I Jawa Timur• Anggota DPRD II Madiun	<ul style="list-style-type: none">• Anggota DPR RI 2024-2029• <i>Internship Coordinator /Marketing Officer, Ecare Careers Melbourne, Australia (Oktober-Desember 2022)</i>• <i>Social Media Manager, Warung Saco Betawi Peranakan (Juni 2021-Februari 2022)</i>

Sumber: Katadata.co.id (2024)

Kehadiran Anggota DPR tertua memberikan konfirmasi hadirnya inkumben dari kelompok usia tua yang menguasai kursi parlemen dalam jabatan yang sama pada beberapa periode. Sebagai contoh yakni pada periode 2024-2029 di mana Guntur Sasono sebagai Anggota DPR tertua yang telah menduduki kursi yang sama sejak 2004-2009 berlanjut 2009-2014 kemudian 2014-2019 dan 2019-2024 kemudian terpilih kembali pada periode 2024-2029. Disisi lain Anggota DPR termuda yakni Annisa Maharani A. M. sebagai Anggota DPR yang baru pertama kali dan belum memiliki pengalaman di parlemen. Hal ini menggambarkan parlemen yang ramah untuk semua usia dan latar belakang bahkan tidak memiliki batasan periodisasi sama sekali sehingga bisa menjadi jabatan seumur hidup bagi seorang politisi.

Jika dibandingkan dengan jumlah populasi pada usia di bawah 40 tahun, ada angka yang tidak seimbang antara jumlah Anggota Parlemen usia muda dengan populasi usia muda (di bawah 40 tahun). Seperti halnya temuan penelitian CSIS (2024) yang dalam publikasinya

menjelaskan bahwa representasi DPR pada usia di bawah 40 tahun tergolong rendah secara nasional jika dikaitkan dengan rasio populasi. Kesulitan politisi muda untuk menduduki kursi parlemen salah satunya dikarenakan oleh tingginya politik dinasti. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh peluang menang calon inkumben dari pemilu ke pemilu yang mana inkumben didominasi bukan oleh oleh usia di bawah 40 tahun.

Pemilu legislatif 2024 memberikan konfirmasi bagaimana dinasti politik mempengaruhi keterpilihan generasi muda untuk menduduki kursi parlemen. Dua orang Anggota Parlemen pada usia termuda yakni Annisa Maharani Alzahra Mahesa, S.E., B.Com (DPR RI) terpilih pada usia 22 tahun (lahir tanggal 17 Juli 2001) dan Larasati Moriska, S.E (DPD RI) terpilih pada usia 22 tahun (lahir 1 Januari 2002). Jika ditelusuri profil masing-masing Anggota DPR dan DPD periode 2024-2029 maka terlihat dengan jelas latar belakang dari dinasti politik yang sangat kuat baik di level daerah maupun nasional.

Anggota DPR termuda periode 2024-2029 yakni Annisa Maharani Alzahra Mahesa, S.E., B.Com merupakan kader Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten II yang berhasil meraih 122.470 suara. Annisa merupakan putri dari aktivis dan politikus Indonesia almarhum Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. yang merupakan Anggota DPR RI sejak 2009 hingga wafatnya pada 2023 dari dapil Kalimantan Timur (2009–2014) dan Banten II (2014–2023). Sama halnya dengan Anggota DPD termuda periode 2024-2029 yakni Larasati Moriska, S.E sebagai anak dari Nardi Azis, politikus Partai Bulan Bintang (PBB).

Ayah dari Larasati menjabat sebagai Ketua DPRD Nunukan periode 2009–2014 sedangkan ibunya yakni Asni Hafid, seorang politikus yang menjabat Anggota DPD 2019–2024 dan adik dari Tamara Moriska (Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara periode 2019–2024 dan 2024–2029). Larasati juga sebagai cucu dari Abdul Hafid Achmad seorang politisi yang menjabat Bupati Nunukan pertama dan sampai saat ini sebagai Ketua DPW Partai NasDem Kalimantan Utara.

Tak hanya itu, Rahma Leppa neneknya Larasati juga menjabat Ketua DPRD Nunukan periode 2019–2024 sekaligus Ketua DPD Partai Hanura Nunukan. Larasati juga keponakan dari Asmin Laura Hafid, Bupati Nunukan dua periode, 2016–2021 dan 2021–2025. Kedua anggota parlemen termuda dari DPR dan DPD merupakan figur yang dipengaruhi oleh kekerabatan politik atau dinasti politik dalam keterpilihannya. Hal ini tentu didukung oleh modal sosial dan modal ekonomi dinasti politik yang telah dibangun bertahun-tahun baik pada lembaga eksekutif maupun legislatif ditingkat lokal maupun nasional.

Kehadiran para pemimpin muda lebih didominasi oleh mereka yang datang dari latar belakang dinasti politik seperti hasil data dari Litbang Kompas yang mencatat angka 62,6 persen (2024). Begitu juga dengan konfirmasi Anggota Parlemen termuda pada periode 2024-2029 yang mana kedua lembaga baik DPR maupun DPD merupakan figur yang datang dari latar relasi politik keluarga atau dinasti politik. Tentu yang menarik untuk kemudian di lengkapi dari para politisi muda yakni kapasitas dan kapabilitas masing-masing.

Hal ini juga menjadi tanggung jawab partai politik untuk melakukan kandidasi secara proporsional untuk semua kader politik. Sehingga setiap kader termasuk yang berusia muda baik dari latar belakang dinasti politik atau pun tidak nantinya hadir sebagai Anggota Parlemen yang berkualitas dan berkomitmen pada kepentingan publik. Disisi lain model rekrutmen politik antar partai politik tidak pasti sama karena tergantung pada dimensi-dimensi tertentu yang mendominasi (Pamungkas, 2012). Perbedaan model rekrutmen dalam kaitannya dengan kandidasi tentu harus tetap memperhatikan hal-hal substansial yang mengikuti.

Bagi politisi yang hadir di parlemen dengan jalur independen melalui DPD, perlu mempersiapkan diri dengan maksimal agar parlemen benar-benar menjadi tempat untuk bekerja secara sungguh-sungguh sebagai wakil rakyat dari unsur *regional representation*. Artinya kepentingan-kepentingan daerah menjadi hal yang diutamakan dan pada akhirnya akan berkontribusi positif bagi kepentingan pembangunan secara nasional. Sampai dengan penyelenggaraan Pemilu 2024, tidak ada regulasi yang membatasi orang-orang yang terindikasi politik keluarga atau dinasti politik untuk ambil bagian dalam pemilu legislatif.

Dengan demikian siapapun warga negara Indonesia termasuk yang memiliki relasi dengan dinasti politik juga memiliki hak untuk menjadi kandidat dan menduduki kursi parlemen. Oleh karena itu partai politik harus memastikan bahwa para kandidat memiliki kualitas, kapasitas dan kapabilitas termasuk mempersiapkan proses rekrutmen serta seleksi yang akuntabel. Selain itu kesadaran personal para kandidat juga harus ditingkatkan oleh para penyelenggara dan ruang-ruang edukasi politik publik sehingga setiap kandidat dapat bersungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan profil kualitas yang dibutuhkan.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Kehadiran figur muda sebagai Anggota Parlemen baik DPR RI maupun DPD RI merupakan hal yang diharapkan oleh publik secara keseluruhan tetapi juga oleh kaum muda agar dapat merepresentasikan kepentingan pada generasi muda. Tetapi kehadiran kaum muda juga diharapkan dapat membawa semangat baru sehingga ruang parlemen menjadi tempat berbagai gagasan, ide dan inovasi baru untuk menjawab berbagai kepentingan publik. Tetapi kehadiran kaum muda dipangung politik khususnya sebagai anggota parlemen juga menemui berbagai masalah seperti tingginya dinasti politik yang mempengaruhi keterpilihan.

Dua Anggota Parlemen termuda pada periode 2024-2029 baik Anggota DPR maupun DPD merupakan figur muda yang berlatar belakang politik keluarga bahkan dinasti politik yang kuat. Pada sisi representasi kaum muda di parlemen, hal ini menjadi hal baik tetapi juga memberikan efek pesimis bagi para politisi muda yang datang dari latar belakang tanpa afiliasi dinasti politik. Namun sampai dengan pemilu 2024 tidak ada regulasi yang membatasi warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang dinasti politik. Hal ini memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk menjadi kandidat.

Akan tetapi kualitas termasuk kapasitas dan kapabilitas para kandidat perlu diperhatikan dan disiapkan oleh partai politik. Hal ini berlaku untuk semua kandidat baik yang datang dari latar belakang dinasti politik ataupun bukan. Proses kandidasi dan rekrutmen politik perlu memperhatikan transparansi dan kejelasan mekanisme. Demikian juga dengan kandidat dengan mekanisme independen yang perlu mempersiapkan diri secara personal dan membutuhkan ruang-ruang edukasi politik publik yang terencana.

B. Rekomendasi

Partai politik perlu meningkatkan kualitas pendidikan politik baik untuk publik tetapi juga untuk para kader partai. Hal ini dibutuhkan untuk membuat publik melek dengan politik dan tidak terjebak pada politik transaksional yang mereduksi kualitas para politisi yang menduduki kursi parlemen. Hal yang sama juga dengan para politisi yang harus benar-benar dipersiapkan melalui mekanisme kandidasi internal partai. Selain itu proses rekrutmen politik harus memperhatikan juga kemampuan substantif para kandidat selain faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi.

Selanjutnya pola kandidasi untuk kandidat Anggota DPD perlu diperhatikan juga mekanismenya. Melalui mekanisme independen/non partai tentunya membutuhkan peran serta publik yang juga sebagai konstituen pada waktu yang sama. Melalui partai politik, kandidasi internal akan lebih memungkinkan untuk memperkuat kualitas kandidat. Berbeda halnya dengan calon independen melalui DPD yang hadir tanpa ikatan dan afiliasi partai politik. Pola kandidasi jalur independen harus dirancang oleh publik yang kemudian dipegang oleh penyelenggara pemilu dan ikut diperkaya melalui ruang-ruang edukasi politik publik.

Pada akhirnya, setiap Anggota Parlemen yang datang dari kaum muda pada periode 2024-2029 baik yang terpilih karena faktor dinasti politik ataupun bukan, haruslah memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat kualitas pribadi. Baik dinasti politik maupun inkumben seumur hidup perlu dipikirkan mekanisme rotasi jabatannya agar tidak mencederai semangat reformasi dan marwah demokrasi. Untuk kepemimpinan yang sehat di negara demokrasi maka regenerasi kepemimpinan yang sehat dan berkualitas harus menjadi hal yang terus dikawal secara bersama-sama.

Daftar Pustaka

- Parlemenkita.org. (2024). *Anggota Parlemen Muda: Komposisi Antar Periode*. Jakarta: CSIS.
- 'Aisy, S. R. (2023). *Dinasti Politik di Indonesia: Studi Kasus Kekuasaan Keluarga di Berbagai Periode Sejarah*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Amriyono Prakoso, Meidi Kosandi. (2024). POLITIK DINASTI DALAM SELEKSI KANDIDAT CALON ANGGOTA LEGISLATIF: STUDI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI DPRD DKI JAKARTA PADA PEMILU 2024. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 48-66.
- Fernandes, A. (2024). *Membangun Parlemen yang Setara untuk Anak Muda dan Perempuan*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Kompas, L. (2024). *Kekerabatan Politik Anggota Terpilih DPD dan DPR RI 2024-2029*. Jakarta : Kompas.
- Nordholt, Henk Schulte, Gerry van Klinken. (2009). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pamungkas, Sigit. (2012). *Partai Politik (Teori dan Praktik di Indonesia)*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.